

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Revolusi industri 4.0 merupakan zaman digital yang seluruh aspek di dalamnya sangat tergantung pada memanfaatkan teknologi informasi berupa internet. Internet hadir menyelesaikan setiap permasalahan karena ia selalu ada dalam posisi pertama pemikiran manusia atau IOT (*Internet of Think*). Pemanfaatan teknologi yang tinggi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat dunia. Saat ini semua pekerjaan hampir terhubung dengan koneksi internet. Revolusi industry tersebut mempengaruhi banyak sector tidak terkecuali sektor Pendidikan.

Pandemi Covid-19 juga membuat banyak sekali perubahan di berbagai sektor, salah satunya adalah pendidikan. Masa pandemi Covid-19 merupakan sebuah kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran atau *learning loss* yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Selain *learning loss*, banyak studi nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa Indonesia juga telah lama mengalami krisis pembelajaran atau *learning crisis*. Studi-studi tersebut menemukan tidak sedikit anak di Indonesia yang kesulitan memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep matematika dasar. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan pendidikan yang cukup curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Tanah Air.

Melihat berbagai tantangan yang terjadi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencoba untuk melakukan upaya pemulihan pembelajaran. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbudristek guna mengatasi permasalahan yang ada ialah mencanangkan kebijakan kurikulum merdeka yang sekarang sedang hangat menjadi buah bibir dalam dunia Pendidikan Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia mengadopsi kebijakan tersebut dengan mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengharuskan Madrasah mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar pada tahun ajaran 2022-2023. Madrasah yang melaksanakan pengimplementasian kurikulum merdeka belajar tersebut ditetapkan oleh Kemenag RI yang diawali oleh proses pengajuan melalui proses pengajuan.

Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bandung merupakan dua Madrasah yang sedang mengimplementasikan kebijakan kurikulum merdeka belajar terhitung mulai pada tahun ajaran 2022-2023. Madrasah mengajukan kesiapan implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar melalui laman PDUM. Kemudian disetujui oleh pihak Kemenag dengan mempertimbangkan semua berkas yang menjadi syarat pengajuan.

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Guru sebagai pendamping dalam proses belajar memerlukan berbagai macam keahlian dan kreativitas yang dapat menunjang keberlangsungan proses pembelajaran sehingga dapat tercapai tujuan dari kurikulum merdeka belajar tersebut.

Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Perubahan kurikulum didasarkan pada perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga mempengaruhi karakteristik peserta didik.

Kurikulum Merdeka baru akan dijadikan kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Namun, untuk saat ini Kurikulum Merdeka baru menjadi opsi

bagi satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya Kurikulum Merdeka bukanlah kurikulum yang wajib diterapkan satuan pendidikan untuk saat ini. Pemerintah hanya menunjuk sekolah tertentu saja sebagai *piloting project* pelaksanaan kurikulum merdeka.

Ada beberapa hal yang mendasari mengapa saat ini Kurikulum Merdeka masih dijadikan opsi. Pertama, Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Kerangka dari sebuah kurikulum memang disusun oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Akan tetapi, satuan pendidikan dan juga gurulah yang bertugas dalam mengoperasionalisasikan dan mengimplementasi kerangka kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

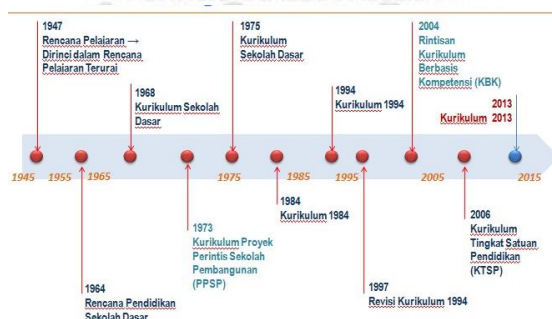
Alasan lainnya mengapa Kurikulum Merdeka baru menjadi opsi adalah perlu dilakukan sosialisasi dan penyesuaian terlebih dahulu sebelum Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Pendekatan bertahap ini memberi waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Selain itu juga satuan Pendidikan dapat menganalisis kesiapan untuk pengimplementasian kurikulum merdeka belajar ini.

Tidak ada kriteria khusus bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka. Kepala sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka. Selanjutnya menganalisis lingkungan atau memperhatikan karakteristik dari satuan Pendidikan.

Kurikulum sebagai bahan acuan dalam melaksanakan aktivitas pendidikan merupakan kajian yang sangat menarik untuk dikupas. Jenis kurikulum yang diterapkan di dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan mesin yang menentukan keberhasilan dari kegiatan pendidikan tersebut. Keberadaannya harus disesuaikan dengan bahan baku yang tersedia, serta hasil yang dikeluarkannya harus sesuai dengan kebutuhan pasar dengan kondisi zaman saat ini.

Kebijakan Kurikulum selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. “Begitupun kurikulum yang ada di Indonesia, keberadaannya terus dikaji dan terus disempurnakan”.<sup>1</sup> Pemerintah selalu berusaha memperbaiki kualitas Pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan kurikulum serta mengkaji keefektivitasan kurikulum dari tahun ke tahun. Walaupun terkadang perubahan tersebut menjadi masalah atau kontroversi dengan pribahasa ganti Menteri ganti kebijakan. Sebetulnya tidak ada pergantian kurikulum, hanya lebih pada penyempurnaan kurikulum sebelumnya, disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman.

Perjalanan kurikulum di Indonesia dimulai sejak tahun 1947 dengan menggunakan nama rencana pelajaran 1947. Kemudian pada tahun 1964 masih dengan nama yang sama yaitu rencana pelajaran 1947. Pada tahun 1968 kurikulum berubah menjadi kurikulum Sekolah Dasar 1968. Saat ini mulai dihimpun mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan beberapa ilmu sosial menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial yang selanjutnya disingkat IPS, dan beberapa mata pelajaran ilmu hayat, ilmu alam, dan sebagainya menjadi Ilmu Pengetahuan Alam yang selanjutnya disingkat IPA. Pada tahun 1973 kurikulum kembali berubah dengan kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Pada tahun 1975 yang disebut dengan kurikulum Sekolah Dasar 1975, yang kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 1984, disempurnakan kembali menjadi kurikulum 1994, kemudian direvisi menjadi kurikulum 1997. Pada tahun 2004 ada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 ada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 2013 dirubah menjadi kurikulum 2013.<sup>2</sup>



**Gambar 1.1 : Sejarah Kurikulum Di Indonesia**

Sumber : Arsip Edukasi

<sup>1</sup> Ismiati Nur Halimah, *Mengapa Kurikulum Perlu Berubah?*. Tersedia dalam <https://www.kompasiana.com/ismianur/63df1a8fa7e0fa6ad80d18d2/mengapa-kurikulum-perlu-berubah>. (Diunduh pada 12 Juni 2023)

<sup>2</sup> Fenty Setiawati. “Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Terhadap Pembelajaran Di Sekolah”. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, 07:1 (Juni 2022), 12

Dari gambar di atas “Indonesia sudah mengalami 11 kali perubahan kurikulum sebagai bukti bahwa pemerintah selalu mengkaji efektivitas kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia”.<sup>3</sup> Tidak hanya sampai disitu kebijakan kurikulum pun kembali berganti seiring terjadinya pandemi covid-19 yang sangat berdampak terhadap dunia Pendidikan. Pemerintah dituntut untuk sigap dalam mengkaji situasi dan kondisi yang ditemukan supaya peserta didik tidak kehilangan pembelajaran.

Kurikulum yang berubah-ubah mengakibatkan kebingungan pada pengguna kurikulum di lapangan. Akan tetapi Firdaus mengatakan bahwa “kurikulum merdeka lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, apabila guru memahami esensi dari kurikulum merdeka”.<sup>4</sup> Dengan demikian sumberdaya guru sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar.

Permasalahan yang muncul adalah banyaknya tantangan yang ditemukan dalam implementasi kurikulum merdeka. Sehingga dalam proses penerapannya tidak semudah yang dibayangkan. “Tantangan yang utama adalah kesiapan sumberdaya manusia (guru) sebagai pilar utama pelaksanaan sebuah kebijakan kurikulum merdeka secara kompetensi dan kemampuan berteknologi”.<sup>5</sup> Sumber daya manusia menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Tidak sekedar keberadaannya saja akan tetapi tingkat kualitas dari sumberdaya manusia tersebut sangat menentukan keberhasilan mewujudkan sebuah implementasi kebijakan. Sumberdaya manusia menjadi point penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, apalagi kebijakannya terkait dengan masalah Pendidikan.

---

<sup>3</sup> Denis Asria. *Sejarah Kurikulum Di Indonesia, Berganti Dari Tahun Ke Tahun*. Tersedia dalam <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-594930218/sejarah-kurikulum-di-indonesia-berganti-dari-tahun-ke-tahun?page=6>. Diunduh pada 12 Juni 2023

<sup>4</sup> Rahmat Fadli. “Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar”. *Jurnal Elementaria Edukasia*. 5:2 (Oktober 2022), 153

<sup>5</sup> Muqorobin. *Tantangan Dalam Penerapan Kurikulum Merdeka*. Tersedia dalam <https://kspstendik.kemdikbud.go.id/read-news/tantangan-dalam-penerapan-kurikulum-merdeka>. Diunduh pada 12 Juni 2023

Sumberdaya manusia di Indonesia kenyataannya masih sangat mengkhawatirkan, masih sangat lemah, sehingga daya saingpun lemah. Implementasi kebijakan apapun tetap sulit untuk mencapai tujuan yang maksimal, karena yang menjalankan kebijakan tersebut kurang kompeten dalam menjalankannya, atau memiliki sumberdaya manusia yang minim. Hal tersebut yang membuat Indonesia lemah jika bersaing dengan negara lain.

Menurut *Global Talent Competitiveness Index (GTCI)* yang memeringkatkan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta “sumber daya manusia yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, Pendidikan, infrastruktur teknologi computer informasi, gender, lingkungan, tingkat toleransi, serta stabilitas politik, berada di posisi ke enam dengan skor 38,61”. Ternyata sumberdaya manusia Indonesia cukup memprihatinkan, hal ini yang membuat Indonesia susah untuk berkembang.<sup>6</sup>

Ada 9 negara yang mengikuti tes GTCI pada tahun 2019. Bisa terlihat dengan jelas kondisi sumberdaya manusia bila dibandingkan dengan 8 negara lainnya.



**Gambar 1.2 Kondisi Sumberdaya Manusia Indonesia**

Sumber : GTCI 2019

<sup>6</sup> Scholastica Gerintya, *Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saingpun Lemah*. Tersedia dalam <https://tirtod.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>. Diunduh pada 12 Juni 2023.

Sumberdaya manusia cakupannya sangat luas. Sumberdaya manusia yang dimaksudkan dalam implementasi kebijakan kurikulum adalah guru. Profesionalisme dan kompetensi guru merupakan modal awal dalam kurikulum merdeka belajar. “Tanpa kedua hal tersebut proses implementasi kebijakan kurikulum merdeka ibarat seorang nahkoda di tengah Samudra yang minus keahlian, sementara di depannya ombak tinggi siap menggulung kapal”.<sup>7</sup> Begitu pentingnya sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam proses sebuah implementasi kebijakan kurikulum, sehingga tidak mungkin dianggap sebagai hal yang sepele.

Sumberdaya manusia dapat diasah dan dikembangkan, karena pada kenyataannya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT paling baik, sempurna dengan fisik serta akal yang lengkap. Kesempurnaan tersebut dimaksudkan agar manusia dapat mengembangkan diri, memaksimalkan sumberdaya manusianya supaya berguna. Sebagaimana firman Allah dalam qur'an yaitu sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. At-Tin [95]:4)

Pemerintah menyediakan dua pilihan kurikulum sebagai strategi untuk menangani *loss learning* (kehilangan pembelajaran) akibat pandemi covid-19. Dua pilihan tersebut yakni satuan Pendidikan boleh menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan kurikulum darurat (kurikulum 2013 yang disederhanakan). Kurikulum darurat diberlakukan supaya pembelajaran di masa pandemi fokus pada penguatan karakter dan kompetensi yang mendasar atau

---

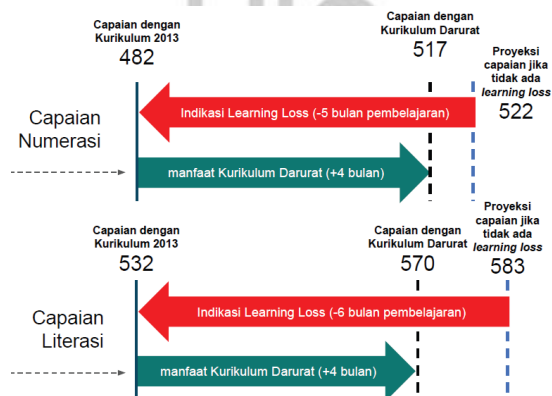
<sup>7</sup> Rusdiana. *Kompetensi Profesional Pendidik: Sebuah Keniscayaan Dalam Pembelajaran Implementasi Kurikulum Merdeka*. Tersedia dalam <http://beritadisdik.com/news/kaji/kompetensi-profesional-pendidik--sebuah-keniscayaan-dalam-pembelajaran-implementasi-kurikulum-merdeka>. Diunduh pada 12 Juni 2023.

esensial. Pemilihan kurikulum ini didasarkan pada karakter masing-masing satuan Pendidikan.

“Siswa pengguna kurikulum darurat ternyata mendapatkan capaian pembelajaran yang lebih baik dari pada pengguna kurikulum 2013 secara penuh”.

<sup>8</sup> Dalam kurikulum darurat siswa fokus pada materi esensial, materi dasar yang aplikatif bahkan yang memerlukan aktivitas fisik. Sehingga dengan demikian siswa seperti tidak merasakan sedang belajar tapi sedang bermain, padahal nyatanya mereka sedang memproses pemahaman konsep. Itu sebabnya capaian kompetensi dalam kurikulum darurat ini lebih baik dibandingkan kurikulum 2013 secara penuh.

Oleh sebab itu pada tahun 2021 Kemdikbudristek memperkenalkan pilihan yang ketiga sebagai opsi pemulihan pembelajaran yaitu kurikulum prototipe yang mulai diterapkan di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Mulai tahun 2022 hingga 2024 semua satuan Pendidikan diberikan tiga opsi kurikulum dalam upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum prototipe. Selanjutnya kurikulum prototipe ini disebut dengan kurikulum merdeka.



**Gambar 1.3 : Proyeksi dampak pandemi pada pengguna kurikulum 2013 dan kurikulum darurat.**

Sumber : Kemdikbudristek 2021

<sup>8</sup> Pengelola Web Kemdikbud. *Dorongan Pemulihan Pembelajaran di Masa Pandemi, Kurikulum Nasional Siapkan Tiga Opsi.* Tersedia dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/dorong-pemulihan-pembelajaran-di-masa-pandemi-kurikulum-nasional-siapkan-tiga-opsi>. Diunduh pada 12 Juni 2023



Sebuah kebijakan siap diimplementasikan apabila sudah melalui tahapan perumusan dan sosialisasi. Begitupun dengan kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum merdeka belajar diimplementasikan setelah melalui proses perumusan dan sosialisasi oleh aktor-aktor internal pembuat kebijakan. Tahapan implementasi merupakan tahapan penting, karena pada tahapan ini akan diketahui sejauh mana kebijakan tersebut diterima dan kebermanfaatannya di masyarakat. Sebagus apapun sebuah kebijakan tiada berarti jikalau tanpa implementasi.

Kebijakan kurikulum merdeka belajar sebagai pemulihan pembelajaran tertuang dalam permendikbudristek No. 56 Tahun 2022. Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat tiga opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen serta beban kerja guru. Kurikulum merdeka telah diimplementasikan secara terbatas pada 2.499 satuan Pendidikan peserta program sekolah penggerak dan 901 SMK dari program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK), 75% adalah sekolah negeri dan sisanya adalah sekolah swasta.<sup>9</sup>

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkadang tidak semuanya terlaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuannya, ada juga kebijakan yang selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun, atau dikaji secara berkala seperti kurikulum. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt dalam Reyes mendefinisikan “kebijakan pendidikan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan di suatu negara, yang diwujudkan dalam bentuk keputusan yang menekankan pada implementasi tindakan, terlepas dari tindakan tersebut pada akhirnya dilakukan atau tidak”.<sup>10</sup>

Implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting. “implementasi sebagai suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan

---

<sup>9</sup> Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kajian Akademik Untuk Pemulihan Pembelajaran*. Pusat kurikulum dan pembelajaran BSKAP Kemdikbudristek 2021, 73

<sup>10</sup> Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 128

sebelumnya”.<sup>11</sup> Begitupun dengan implementasi kebijakan kurikulum merupakan serangkaian kegiatan untuk mewujudkan sebuah ketetapan pemerintah yang berhubungan dengan seperangkat rencana yang disebut kurikulum merdeka belajar untuk mencapai tujuan Pendidikan.

Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar yang akan diterapkan di Madrasah efektivitasnya akan tergantung pada sejauh mana kesiapan sumberdaya manusia yang akan menjalankannya. Kemdikbudristek mempersiapkan sumberdaya manusia melalui program guru penggerak untuk menjalankan kebijakan kurikulum merdeka di sekolah. Lalu bagaimana keadaan sumberdaya manusia yang ada di Madrasah terkait dengan pengimplementasian kurikulum merdeka belajar?.

Implementasi kebijakan kurikulum sebagai rencana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas Pendidikan memerlukan sumberdaya manusia yang siap untuk bergerak sebagai faktor pendukung. Selain itu juga perlu adanya identifikasi mengenai faktor pendukung dan penghambat proses implementasi dari sebuah kebijakan. Hal tersebut dilakukan supaya proses implementasi dapat berjalan dengan lancar.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ada 4, sebagaimana yang dikatakan Edwards III “..... *four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structure*”.<sup>12</sup> Faktor penting yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan sikap dari struktur birokrasi

Kurikulum merdeka belajar mulai diimplementasikan di Madrasah yang merupakan sekolah formal binaan Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun pelajaran 2022-2023. “Adapun pengimplementasian kurikulum merdeka belajar di Madrasah mengacu pada Keputusan Menteri Agama yang selanjutnya

---

<sup>11</sup> Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 122

<sup>12</sup> George Edwards III. *Implementing Public Policy*. (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), 9

disingkat (KMA) nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka belajar di Madrasah”.<sup>13</sup> Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah mengacu pada keputusan permendikbudristek tentang penetapan kurikulum sebagai upaya pemulihan pembelajaran pada satuan Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan menengah, namun Madrasah melakukan adaptasi sesuai kebutuhan terutama pada bidang Pendidikan Agama Islam dan Bahasa arab yang menjadi ciri khas madrasah.

Kebijakan Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip menyempurnakan kurikulum 2013. Menurut Permendikbud no. 22 tahun 2020 kurikulum yang terbentuk oleh kebijakan merdeka belajar berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak (*soft skills*), dan akomodatif terhadap kebutuhan dunia.

Implementasi kurikulum di Madrasah mengemban dua amanat besar, yaitu membekali peserta didik dengan kompetensi, sikap, dan keterampilan hidup supaya bisa menghadapi tantangan zaman, serta mewariskan karakter budaya dan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus supaya tidak terlepas dari akar budaya, nilai agama, dan nilai luhur bangsa. Untuk menjalankan dua amanat tersebut, maka kurikulum harus dinamis dan berkembang mengikuti tuntutan zaman. “Dunia modern tidak lagi memberikan penghargaan terhadap seseorang atas pengetahuannya, karena teknologi telah menyediakan semua pengetahuan yang dibutuhkan. Akan tetapi dunia modern lebih menghargai atas kreatifitas yang dilakukan oleh seseorang atas pengetahuan yang dimilikinya”.<sup>14</sup> Jadi pembentukan karakter mandiri dan kreatif merupakan hal penting yang harus dikembangkan.

Implementasi kebijakan kurikulum merdeka di Madrasah dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

---

<sup>13</sup> Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2022, *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah*. Kemenag RI 2022, 1

<sup>14</sup> Admin Among Guru. *Panduan Pengembangan P5 dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin*. Tersedia dalam <https://www.amongguru.com/panduan-pengembangan-p5-dan-profil-pelajar-rahmatan-lil-alamini/>. Diunduh pada tanggal 13 November 2022

pada surat keputusan dengan nomor 3811 tahun 2022 tentang Madrasah pelaksana kurikulum merdeka tahun 2022/2023 pada jenjang RA, MI kelas 1 dan 4, MTs Kelas 7 dan MA/MAK kelas 10. MAN 1 Kabupaten Bandung dan MAN 2 Kabupaten Bandung merupakan Madrasah Aliyah *piloting project* kurikulum merdeka belajar. Kedua Madrasah Aliyah Negeri ini sedang melaksanakan kurikulum merdeka belajar terhitung tahun ajaran 2022-2023.

Sebagai studi awal kepentingan penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung pada tanggal 21 November 2022 untuk melihat apakah memang benar Madrasah tersebut sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Kedua Madrasah Aliyah Negeri tersebut memang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar, dan kedua Madrasah tersebut merupakan Madrasah *piloting* yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melaksanakan kurikulum merdeka belajar pada tahun ajaran 2022-2023 sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3811 Tahun 2022 tentang Madrasah pelaksana kurikulum merdeka tahun ajaran 2022-2023.

Peneliti merasa tertarik untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di kedua Madrasah tersebut, apakah kedua Madrasah tersebut memiliki permasalahan yang sama atau tidak dalam melaksanakan *piloting project* kurikulum merdeka belajar. Peneliti yakin hal tersebut penting karena faktor penghambat atau kendala harus diketahui dan dipelajari sejak dini guna untuk mencapai efektivitas implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di Madrasah. Sehingga dengan demikian peneliti mengambil judul Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Madrasah Aliyah Piloting Kementerian Agama Republik Indonesia (Penelitian Di Madrasah Aliyah Negeri 1 dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Bandung).

Penelitian ini sangat penting dilaksanakan karena keberhasilan sebuah implementasi kebijakan kurikulum sangat tergantung pada komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi. Apabila ke empat faktor tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka kebijakan kurikulum sudah siap dilaksanakan di

lapangan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Pada Madrasah Aliyah Piloting Kementerian Agama Republik Indonesia (Penelitian Di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung)” sejauh ini penulis belum pernah menemukannya. Pada penelitian terdahulupun belum ada kajian yang serupa mengenai implementasi kebijakan kurikulum khususnya kebijakan kurikulum merdeka belajar di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kabupaten Bandung yang berlandaskan teori, sehingga diharapkan akan menjadi acuan, gambaran, serta persiapan untuk kelancaran proses implementasi kebijakan kurikulum di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang penelitian, maka untuk mengimplementasikan kebijakan kurikulum merdeka belajar di Madrasah perlu dianalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Untuk lebih spesifik dalam pembahasannya penulis *brakedown* kepada beberapa sub masalahnya dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana sumberdaya dalam pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana disposisi dalam pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk

memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di Madrasah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Komunikasi dalam proses implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung.
2. Sumberdaya dalam proses pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung.
3. Disposisi dalam proses pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung.
4. Birokrasi dalam proses pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung.
5. Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di MAN 1 dan MAN 2 Kabupaten Bandung.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat. Secara garis besar manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen, terutama dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar khususnya di Madrasah. Selanjutnya, selain itu juga hasil penelitian ini sebagai kontribusi bagi peneliti lain supaya bisa mengembangkan riset mengenai implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dengan menggunakan teori yang lainnya. Atau mengembangkan teori yang sama pada satuan Pendidikan yang berbeda. Atau mengevaluasi dari implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

### **a. Bagi peneliti**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan diri dalam tata cara penulisan karya ilmiah khususnya tentang implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di Madrasah Aliyah, serta pengembangan teori Edward III yang diaplikasikan langsung di lapangan. Serta menambah kemitraan dalam dunia Pendidikan.

### **b. Bagi lembaga pendidikan**

Sebagai masukan bagi Madrasah yang dijadikan sasaran penelitian, untuk memaksimalkan prasyarat atau daya dukung untuk pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar, serta sebagai contoh bagi lembaga lain atau Madrasah lainnya supaya lebih siap dalam menerapkan sebuah kebijakan, khususnya kebijakan kurikulum merdeka belajar yang masih baru diterapkan di Madrasah.

### **c. Bagi Peneliti Lain**

Diharapkan menjadi acuan atau referensi dalam kajian implementasi kebijakan kurikulum pendidikan khususnya di Madrasah untuk menjawab tantangan berkembangnya zaman serta keharusan mengikuti aturan yang berlaku.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kebijakan memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung pada pemahaman atau penafsiran yang membacanya. “Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu *polis* yang berarti kota. Kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga yang bermaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.<sup>15</sup> Yang mengeluarkan kebijakan adalah salah satu pihak yang berpengaruh dalam sebuah lembaga atau biasa disebut dengan pemerintah. Dapat pula diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang berlaku umum.

Selain itu pengertian lain diungkapkan oleh William N. Dunn, bahwa “kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

---

<sup>15</sup> Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina dan Nurhizrah Gistituati. “Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan”. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6:1 (Juni, 2021), 67.

memecahkan suatu masalah tertentu”.<sup>16</sup> Untuk melakukan tindakan tersebut tentunya membutuhkan prasyarat tertentu yang harus diperhatikan supaya tidak melenceng dari kebijakan yang telah ditentukan.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa “Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran”.<sup>17</sup> Sebuah proses yang dilakukan membutuhkan strategi untuk mencapai target sasaran agar efektif dan efisien.

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa “kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat, bersifat *problem solving* dan proaktif.”<sup>18</sup> Misalnya adalah kebijakan kurikulum merdeka belajar yang mulai diterapkan seiring berakhirnya pandemi covid-19.

Kebijakan sebagai sebuah keputusan tetap yang merupakan pengulangan tingkah laku memiliki beberapa komponen yang berkaitan satu sama lain.

Komponen tersebut adalah *goal, plan, program, decision and effect*. *Goal* merupakan tujuan yang diinginkan dari kebijakan itu sendiri. *Plan* merupakan rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. *Program* adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan. *Decision* ialah tindakan nyata yang lebih spesifik mulai dari rencana sampai evaluasi. Sedangkan *effect* merupakan akibat yang ditimbulkan oleh rencana yang telah ditetapkan.<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan sebuah aturan yang ditulis oleh pembuat kebijakan atau pemerintah yang berdasarkan atas sebuah kejadian tertentu yang sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang

---

<sup>16</sup> Arwildayanto, Arifin Sukung dan Warni Tune Sumar. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif dan Aplikatif*. (Bandung: Cendekia Press. 2016), 3

<sup>17</sup> Sumar. *Analisis Kebijakan*, 2

<sup>18</sup> Abdul Rozak, “Kebijakan Pendidikan Di Indonesia”. *Journal Of Islamic Education*, 3:2 (Juni,2021), 200

<sup>19</sup> Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik*. (Badan Penerbit UNM:2019), 8



dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang dijadikan landasan, pijakan, serta garis hukum yang dijadikan pedoman dalam melangkah.

Kebijakan Pendidikan mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Adapun karakteristik kebijakan Pendidikan yaitu; “memiliki tujuan Pendidikan; terpenuhinya aspek legal dan formal; memiliki konsep operasional; dibuat oleh yang berwenang; dapat dievaluasi; dan memiliki sistematika yang jelas”.<sup>20</sup>

Arah kebijakan Pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk mencapai beberapa hal, diantaranya adalah

Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu tinggi, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional tenaga pendidik, melakukan pembaharuan sistem Pendidikan, memberdayakan Lembaga Pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah, meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan, mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatkan penguasaan, pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Kurikulum merdeka belajar tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No 56 Tahun 2022 yang berisi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang terdiri atas tiga pilihan kurikulum yang dapat digunakan di satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen serta beban kerja guru.

Kementerian Agama Republik Indonesia selanjutnya menetapkan kebijakan implementasi kurikulum merdeka pada Madrasah melalui Keputusan Menteri Agama nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada Madrasah. Pada dasarnya implementasi kurikulum merdeka di Madrasah kebijakannya mengikuti kebijakan yang diterapkan di sekolah oleh Kemdikbudristek. Hanya ada perbedaan pada isi muatan kurikulumnya.

---

<sup>20</sup> Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina dan Nurhizrah Gistituati. “Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI)*. 6:1, (Juni, 2021), 69.

<sup>21</sup> Rozak, “Kebijakan Pendidikan”, 21

Mengenai penunjukkan Madrasah pelaksana kurikulum merdeka belajar tertuang “dalam keputusan direktur jenderal Pendidikan Islam nomor 3811 tahun 2022 tentang Madrasah pelaksana kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Dalam lampiran IV tercantum nama Madrasah Aliyah yang ditunjuk untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka belajar di seluruh Indonesia”.<sup>22</sup> Sebuah kebijakan dibuat tentunya memiliki tujuan tertentu yang harus diwujudkan dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang khusus yakni penyusunannya lebih terarah dan jelas serta memberikan gambaran mengenai kontribusi terhadap dunia Pendidikan

Menurut Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tujuan kurikulum merdeka belajar adalah: (1) Mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri Pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. (2) Mempercepat pencapaian tujuan Pendidikan nasional. (3) Menyiapkan tantangan global era revolusi 4.0. (4) Menguatkan Pendidikan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (P5) dan Profil Pelajar Rahmatan Lilalamin (PPRA). (5) Meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia.<sup>23</sup>

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan tentunya ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya. “Menurut George Edwad III (1980) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi sebuah kebijakan, yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi”.<sup>24</sup> Apabila ke empat komponen tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka secara manajemen proses implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar sudah siap dilaksanakan di suatu Lembaga tersebut. Tujuan yang menjadi tolak ukur pada satuan Pendidikan khususnya adalah untuk menguatkan Pendidikan karakter serta menunjukkan kemampuan madrasah secara internal untuk berinovasi secara terbuka menjawab kebebasan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola sendiri Pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

---

<sup>22</sup> Gistituati. “Konsep Dasar”, 69

<sup>23</sup> Badan Standar Kurikulum. *Kajian Akademik*, 13

<sup>24</sup> Gunawan, “Implementasi Kebijakan Ujian Sekolah Berbasis Android Untuk Peningkatan Standar Penilaian Di SMP Negeri 3 Situraja”. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 1:4 (Maret, 2021), 263

Untuk lebih jelas dan spesifik dalam memahami bagaimana pembahasan penelitian yang akan dilakukan, penulis ilustrasikan pada kerangka berfikir sebagai berikut:



**Gambar. 1.4 Alur Kerangka Berpikir**

Sumber: Dikembangkan oleh peneliti

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. yaitu:

### 1. Penelitian Muhammad Rifai Harahap, Syahdan Lubis, Syafaruddin dan Makmur Syukri.

Penelitian ini berjudul implementasi kebijakan kurikulum dalam peningkatan mutu lulusan di MIN se kota Sibolga. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap pengaruh implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar terhadap mutu lulusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kurikulum dalam peningkatan mutu lulusan serta untuk mengetahui strategi pembinaan guru untuk pengimplementasian tersebut serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar di sekolah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deksriptif melalui Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi diwujudkan dengan siklus manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Fokus siklus itu pada peningkatan mutu lulusan. Kemudian untuk mencapainya dilakukan pembinaan

guru melalui workshop, yang secara praktik di MIN-se Kota Sibolga tidak ada perbedaan. Pembinaan terbagi dua yakni pembinaan pusat yaitu dari Kemendikbud dan Kemenag, dan pembinaan mandiri yaitu dilakukan atas kebijakan kepala madrasah dengan mengundang pakar. Kemudian faktor pendukung ialah kualifikasi dan kompetensi guru yang sudah sesuai, serta motivasi guru mensukseskan program tersebut. Sedangkan faktor penghambat adalah belum maksimal sarana dan prasarana, dan kondisi *real* di lapangan yang kerap bersebrangan dengan kondisi ideal harapan pemerintah.

## **2. Penelitian Muhammad Nur Matdoan**

Penelitian ini berjudul efektifitas implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada satuan Pendidikan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Latar belakang penelitian ini adalah keingintahuan penulis terhadap efektivitas implementasi kebijakan kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana tingkat efektivitas implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada satuan Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK) khususnya di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, supaya dapat mengurangi kesenjangan antara satuan Pendidikan yang telah melaksanakan K13 di Kota Ambon dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku. Penelitian dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan Edwards III. Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum 2013 di tempat penelitian belum efektif hal tersebut dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan pengangkatan birokrasi yang belum maksimal, hal tersebut ditunjukkan dengan ketidakterlibatan semua pihak dalam mengembangkan kurikulum 2013 padahal seharusnya mereka terlibat.

## **3. Penelitian Jarwandi**

Penelitian ini berjudul implementasi kurikulum darurat masa pandemic covid-19 dalam pembelajaran di MAN 1 Klaten. Tesis ini ditulis pada tahun 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya masalah pada implementasi kurikulum darurat pada saat pandemic covid-19 yang dirasakan di MAN 1 Klaten yaitu kondisi guru yang Sebagian besar usianya di atas 50 Tahun sehingga kurang responsive terhadap perkembangan teknologi. Sehingga tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui implementasi kurikulum darurat di MAN 1 Klaten, untuk mengetahui hambatan dari implementasi kurikulum darurat, serta untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan MAN 1 Klaten sudah mengimplementasikan kurikulum darurat, masalah yang ditemukan adalah saat penyusunan kurikulum darurat dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun cara menghadapi hambatan tersebut adalah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak lain, memanfaatkan MGMP dan Kerjasama antara guru, guru BK dan pihak orangtua.

#### **4. Penelitian Ucup Supriatna**

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Kurikulum Darurat Madrasah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi covid-19 yang mengubah pola pembelajaran dengan segala keterbatasan yang terjadi di MI Kabupaten Ketapang, sehingga keluar kebijakan kurikulum darurat Madrasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan kurikulum darurat Madrasah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MI Kabupaten Ketapang sudah menerapkan kurikulum darurat dengan hasil yang mendekati standar, namun kegiatan inti masih jauh dari standar. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan media pembelajaran hybrid, pembelajaran dengan menggunakan metode *blended learning* dan guru kunjung.

#### **5. Penelitian Rahmat fadhli**

Penelitian ini berjudul implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kurikulum dalam proses Pendidikan sehingga kurikulum dianggap bagian integral dari Pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kurikulum merdeka di SDN Guru Minda Kota Bandung melalui metode kualitatif, yang diambil dari 4 jurnal relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan kurikulum merdeka sudah dilaksanakan di Sekolah dasar walaupun memerlukan beberapa perbaikan dan pengembangan.

## **6. Penelitian Restu Rahayu, Rita Rosita, Yayu Sri Rahayuningsih, Asep Herry Hernawan, Prihantini.**

Penelitian ini berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Penggerak. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya kebijakan kurikulum merdeka belajar dan lahirnya sekolah penggerak binaan Kemendikbudristek. Peneliti merasa tertarik untuk menganalisis pengimplementasian kebijakan kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan memperoleh informasi tentang penerapan kurikulum merdeka di sekolah penggerak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak telah dilaksanakan dengan optimal dan sedang berlangsung. Walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan hambatan.

Hasil analisis dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semua judul yang relevan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Hanya ada satu penelitian yang menggunakan teori Edward III, akan tetapi objek yang menjadi pembahasan adalah kebijakan kurikulum 2013. Adapun penelitian yang lainnya hanya membahas implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar dalam lokasi tertentu tanpa berbasis teori. Walaupun penelitian ini sama-sama merupakan penelitian kualitatif akan tetapi ada perbedaannya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas yaitu penelitian membahas kebijakan kurikulum yang baru diterapkan di Madrasah yaitu kebijakan kurikulum merdeka belajar. Selain itu yang membedakan adalah penelitian ini berbasis teori, sedangkan penelitian-penelitian lainnya tidak berbasis teori.

## **7. Penelitian Endik Hidayat**

Penelitian ini berjudul Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemic covid-19 di Sampang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemic covid-19 sehingga keluar sebuah kebijakan mengenai dana desa. Peneliti merasa tertarik untuk melihat faktor keberhasilan dari program tersebut yang dianalisis menggunakan teori Edward III. Tujuan penelitian adalah untuk

mengetahui faktor yang memperkuat keberhasilan program dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang penghambat dari kebijakan dana desa ini adalah muncul dari dimensi sumberdaya karena keterbatasan anggaran dana desa sehingga sarana prasarana belum tercukupi.

#### **8. Penelitian Yakob Noho Nani**

Penelitian ini berjudul Peran Komunikasi dalam implementasi kebijakan perluasan akses Pendidikan Secara merata. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan Pendidikan di Gorontalo yang masih sangat terbatas dari segi anggaran, tenaga pendidik, sarana dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunikasi yang efektif dalam kebijakan pendidikan melalui analisis teori Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan metode dan pendekatan yang hanya bisa efektif jika komunikasi dapat terjalin dengan baik

#### **9. Penelitian Nurin Kusnia**

Penelitian ini berjudul Sumber daya dalam implementasi kebijakan Pendidikan inklusi di SDN Betet 1 Kediri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya kebijakan Pendidikan inklusi dan peneliti merasa tertarik untuk meneliti masalah sumberdaya. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori Edward III yang konsen pada masalah sumberdaya. Tujuan penelitian untuk melihat sejauhmana sumberdaya dalam implementasi kebijakan Pendidikan inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya dalam implementasi kebijakan Pendidikan inklusi masih banyak kendala.

#### **10. Penelitian Roby Hadi Putra**

Penelitian ini berjudul *Concept of George C. Edwards III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera*. Latar belakang penelitian ini adalah lahirnya kebijakan Perda No. 12 Tahun 2017 tentang kepemudaan. Peneliti bertujuan untuk mengungkap implementasi perda No. 12 Tahun 2017 di daerah Sumatra Barat yang dijadikan lokasi penelitian dengan menggunakan teori yaitu

Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik, sumberdaya masih belum maksimal, disposisi belum dikategorikan baik, dan birokrasi belum baik.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Implementasi**

Implementasi jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *penerapan*. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi implementasi

Menurut Usman implementasi bermuara pada aktivitas, aksi nyata, tindakan, atau adanya mekanisme dari suatu sistem yang terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan menjadi tindakan dalam rangka menyempurnakan suatu program. Adapun menurut Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang sudah terencana serta melibatkan ketentuan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **2. Kebijakan**

Secara etimologi kebijakan berasal dari Bahasa Yunani "*polis*" yang berarti negara atau kota, sedangkan dalam Bahasa latin yaitu "*politia*" yang berarti negara. Sedangkan dalam Bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>26</sup>

Kebijakan merupakan sebuah alternatif cara penyelesaian sebuah masalah dengan sangat mementingkan kemaslahatan bersama. Karena memang kebijakan lahirnya dari sebuah masalah, dan diambil sebuah kebijakan untuk menyelesaikan masalah. Tentunya tindakan yang terjadi dalam proses implementasi sebuah kebijakan harus focus pada tujuan yaitu menyelesaikan masalah.

---

<sup>25</sup> Ali Miftakhu Rosyad, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah". *Jurnal Keilmuan Dan Manajemen Pendidikan (Tarbawi)*, 5:2, (Desember, 2019), 176

<sup>26</sup> Andi Cudai Nur dan Muhammad Guntur. *Analisis Kebijakan Publik*. (Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2019), 4



Menurut James Anderson kebijakan adalah “*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. Dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan sebuah Langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau oleh sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.<sup>27</sup>

Langkah yang diambil dalam proses implementasi sebuah kebijakan tentunya merupakan sebuah langkah yang disengaja, yang diawali dengan struktur perencanaan, dan diakhiri dengan proses evaluasi.

“Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuat maupun yang menaatinya. Kebijakanpun merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah”.<sup>28</sup> Implementasi kebijakan kurikulum dikaji paling lambat setiap 10 tahun sekali guna diketahui batas efektivitasnya sampai sejauh mana.

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasari oleh sebuah pemikiran terkait kejadian atau ketidakpuasan atau bisa juga disebut dengan masalah yang diusulkan oleh seseorang, yang mana tindakan tersebut mengarah pada penyelesaian masalah atau untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan.

### 3. Kurikulum

Kurikulum dalam Bahasa Latin diartikan sebagai sebuah lintasan untuk berlari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada Lembaga Pendidikan atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Menurut Checkley kurikulum adalah perencanaan untuk mendukung proses pembelajaran yang terdiri dari sekumpulan materi yang digunakan pada setiap level kelas, sekumpulan panduan guru, dan penilaian kelasnya. Sedangkan menurut Smith kurikulum disusun oleh fakta-fakta dan teori-teori yang diajarkan sedemikian supaya siswa paham sebelum mereka memahami sesuatu yang lebih tinggi. Menurut Howson, Keitel dan Kilpatrick kurikulum berisikan silabus yang mencakup tujuan, isi, metode, dan prosedur penilaian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”. (Bandung:Sinar Grafika Offse, cet.7. 2020), 15

<sup>28</sup> Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan*, 25.

<sup>29</sup> Joko Suratno, Diah Prawitha Sari, dan Asmar Bani. “ Kurikulum dan Model-Model Pengembangannya”. *Jurnal Pendidikan Guru Matematika*, 2:1 (Januari, 2022), 68